

Strategi UKM Indonesia

I WAYAN DIPTA

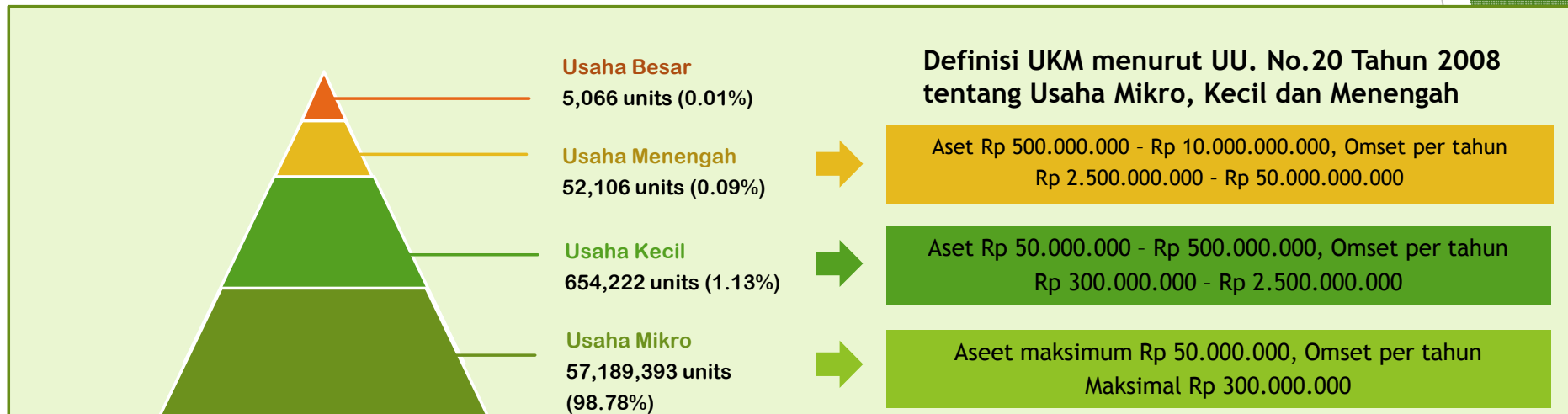
Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran
Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

ILO/OECD Workshop for Policy Makers on Productivity and Working Conditions in SMEs

Jakarta, 13 Juni 2017

STRUKTUR USAHA DI INDONESIA

Jumlah Usaha di Indonesia 2013



Sumber: Bagian Data KUKM

- Membuka lapangan kerja
- Mengurangi kemiskinan
- Memacu pertumbuhan ekonomi
- Pemerataan pembangunan
- Pembangunan berkelanjutan

Peran UKM

- UKM (2013) mencapai 57.89 juta unit (99.99%), dengan usaha besar berjumlah 5.066 unit (0.01%).
- UKM berkontribusi 97.16% dalam lapangan kerja dan 58.65% terhadap GDP

Kontribusi UKM terhadap Ekonomi

- Keuangan
- Pasar
- Teknologi dan Inovasi
- Layanan konsultasi dan informasi
- Pengembangan SDM
- Kebijakan dan Aturan

Permasalahan UKM

SASARAN KEBIJAKAN PENINGKATAN DAYA SAING UMKM DAN KOPERASI 2015-2019

TARGET	INDIKATOR	NILAI
1. Meningkatnya kontribusi UMKMK perekonomian.	1. Pertumbuhan kontribusi UMKM-K dalam pembentukan PDB (rata-rata/tahun)	6,5-7,5%
	2. Pertumbuhan jumlah tenaga kerja UMKM-K (rata2/ tahun)	4,0-5,5%
	3. Pertumbuhan kontribusi UMKM-K dalam ekspor non migas (rata2/tahun)	5,0-7,0%
	4. Pertumbuhan kontribusi UMKM-K dalam investasi (rata2/ tahun)	8,5-10,5%
2. Meningkatnya daya saing UMKM-K	5. Pertumbuhan produktivitas UMKM (rata-rata/tahun)	5,0-7,0%
	6. Proporsi UMKM yang mengakses pembiayaan formal (target tahun 2019)	25,0%
	7. Jumlah UMKM-K yang menerapkan standardisasi mutu dan sertifikasi produk (kumulatif selama 5 tahun)	50.000 unit
3. Meningkatnya usaha baru	8. Pertambahan jumlah wirausaha baru melalui program pusat dan daerah (kumulatif selama 5 tahun)	1 juta unit
4. Meningkatnya kinerja kelembagaan & usaha koperasi	9. Partisipasi anggota koperasi dalam permodalan (target tahun 2019)	55,0%
	10. Pertumbuhan jumlah anggota koperasi (rata2/tahun)	7,5-10,0%
	11. Pertumbuhan volume usaha koperasi (rata2/tahun)	15,5-18,0%

RANCANGAN PRIORITAS NASIONAL DAN PROGRAM PRIORITAS 2018

Revolusi Mental

Kesetaraan Gender

I. PENDIDIKAN

1. Pendidikan Vokasi .
2. Peningkatan kualitas guru.

II. KESEHATAN

3. Peningkatan Kesehat-an Ibu dan Anak.
4. Pencegahan & Penang-gulangan Penyakit
5. Preventif dan Promotif (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat)

III. PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

6. Penyediaan Perumahan Layak
7. Air Bersih dan Sanitasi

IV. PENGEMBANGAN DUNIA USAHA DAN PARIWISATA

8. Pengembangan 3 Kawasan Pariwisata (dari 10)
9. Pengembangan 5 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) (dari 10)
10. Pengembangan 3 Kawasan Industri (KI) (dari 14)
11. Perbaikan Iklim Investasi dan Penciptaan Lapangan Kerja
12. Peningkatan Ekspor Barang dan Jasa Bernilai Tambah Tinggi

V. KETAHANAN ENERGI

13. EBT dan Konservasi Energi
14. Pemenuhan Kebutuhan Energi

VI. KETAHANAN PANGAN

15. Peningkatan Produksi pangan
16. Pembangunan sarana & prasa-rana pertanian (termasuk iri-gasi)

VII. PENANGGULANGAN KEMISKINAN

17. Jaminan dan Bantuan Sosial Tepat Sasaran
18. Pemenuhan Kebutuhan Dasar
19. Perluasan Akses Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi

VIII. INFRASTRUKTUR, KONEKTIVI-TAS, DAN KEMARITIMAN

20. Pengembangan Sarana dan Pra-sarana Transportasi (darat, laut, udara, dan inter-moda)
21. Pengembangan Telekomunikasi dan Informatika

IX. PEMBANGUNAN WILAYAH

22. Pembangunan Wilayah Perbata-san dan Daerah Tertinggal
23. Pembangunan Perdesaan
24. Reforma Agraria
25. Pencegahan & Penanggulangan Bencana (al kebakaran hutan)
26. Percepatan Pembangunan Papua

X. POLITIK, HUKUM, PERTAHANAN & KEAMANAN

- | | |
|-------------------------------------|-------------------------|
| 27. Penguatan Pertahanan | 29. Kepastian Hukum |
| 28. Stabilitas Politik dan Keamanan | 30. Reformasi Birokrasi |

Kementerian KUKM

Perubahan Iklim

Pemerataan

Tata kelola Pemerintahan yang Baik

PRIORITAS NASIONAL DAN PROGRAM PRIORITAS 2018 YANG TERKAIT KUKM



Kerangka Kebijakan

- ▶ Peningkatan aturan dan regulasi atau deregulasi untuk meningkatkan iklim usaha yang kondusif.
 - ▶ Perbaharuan UU No. 25 Tahun 1992 tentang pengembangan koperasi dan peraturan perundang-undangan lainnya.
 - ▶ Penyediaan layanan penyederhanaan izin usaha bagi UKM.
- ▶ Penyediaan fasilitas untuk meningkatkan produktivitas UKM dan koperasi.
 - ▶ Penyediaan teknologi bagi koperasi dan UKM dengan panduan teknis agar dapat dimanfaatkan.
- ▶ Promosi yang dilakukan baik secara lokal/nasional dan internasional untuk meningkatkan akses produk yang dihasilkan oleh UKM dan koperasi untuk pasar nasional dan internasional.
- ▶ Peningkatan lembaga keuangan termasuk lembaga penjaminan kredit lokal yang ditujukan untuk meningkatkan akses keuangan bagi UKM dan koperasi.
- ▶ Revitalisasi koperasi untuk memperkuat dan meningkatkan kemandirian koperasi.
 - ▶ Pengembangan SDM bagi pengurus dan anggota koperasi
 - ▶ Pengembangan sistem usaha
 - ▶ Peningkatan jaringan usaha antar koperasi



Catatan:

- Kerangka kebijakan koperasi dan UKM di Indonesia belum memiliki spektrum yang luas.
 - Tahapan awal sistem penjaminan kredit
 - Keterbatasan insentif bagi peningkatan produktivitas koperasi dan UKM
 - Kurangnya koordinasi dalam pengembangan program antara pemerintah pusat dan daerah
- Fokus dalam pembangunan SDM dan kewirausahaan
- Terbatasnya dana bagi usaha start-up dan R&D

Peran Pemerintah Pusat dan Daerah

Menurut **Undang-Undang No. 23 Tahun 2014** tentang Pemerintah Daerah, pembagian tanggung jawab pemerintah dalam pengembangan koperasi dan UKM adalah sebagai berikut:

- ▶ Tugas pemerintah pusat antara lain:
 - Menyusun peraturan koperasi dan UKM
 - Menyusun kebijakan dan program terkait koperasi dan UKM
- ▶ Pembagian tanggung jawab antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kota/kabupaten, adalah:
 - Pemberdayaan Usaha Menengah merupakan tanggung jawab pemerintah pusat
 - Pemberdayaan Usaha Kecil merupakan tanggung jawab pemerintah provinsi
 - Pemberdayaan Usaha Mikro merupakan tanggung jawab pemerintah kota/kabupaten

Kebutuhan Sinergitas K/L Terkait UKM

NAWA CITA PRESIDEN

6. Meningkatkan Produktivitas Rakyat dan Daya Saing di Pasar Internasional
7. Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dengan menggerakkan Sektor-Sektor Strategis Ekonomi Domestik

KEBIJAKAN UKM

1. Meningkatkan aturan dan regulasi UKM
2. Meningkatkan produktivitas UKM dan Koperasi
3. Meningkatkan akses pasar bagi UKM dan koperasi
4. Meningkatkan akses keuangan
5. Meningkatkan kemandirian koperasi

ASEAN SAP SMED 2015-2025

1. Meningkatkan Produktivitas, Teknologi dan Informasi
2. Meningkatkan Akses Keuangan
3. Meningkatkan Akses Pasar dan Internasionalisasi
4. Meningkatkan Iklim Peraturan dan Kebijakan
5. Meningkatkan Kewirausahaan dan Sumber Daya Manusia

KEMENTERIAN / LEMBAGA

1

1. Kementerian Pertanian
2. Kementerian Perikanan dan Kelautan

2

1. Bank Indonesia
2. Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
3. Kementerian Keuangan
4. LPDB
5. Jamkrindo

3

1. Kementerian Perindustrian
2. Kementerian Perdagangan
3. Kementerian Desa, PDTT
4. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
5. Badan Ekonomi Kreatif (BEKRAF)
6. Lembaga Layanan Pemasaran (LLP) KUKM
7. Badan Standardisasi Nasional (BSN)
8. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)

4

1. Kementerian Dalam Negeri
2. Kementerian Hukum dan HAM

5

1. Kementerian Tenaga Kerja
2. Kementerian Pemuda dan Olahraga
3. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

1. BAPPENAS
2. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
3. Kementerian Koperasi dan UKM
4. Badan Pusat Statistik (BPS)

Kebutuhan Perbaikan

- ▶ Perbaikan koordinasi dalam kerangka pengembangan kebijakan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah serta stakeholder yang terlibat.
 - Menciptakan spektrum yang lebih luas dalam pengembangan koperasi dan UKM
 - Memperjelas peran dan fungsi dari setiap implementasi kebijakan dan program (mengurangi ketumpang tindihan program)
 - Menciptakan sudut pandang yang sama dalam pengembangan koperasi dan UKM, terutama dalam peningkatan produktivitas
 - Sistem pajak dan insentif termasuk sistem pembiayaan (hibah, venture capital, angel investor, dll.)
 - Mengurangi ketidakpastian
- ▶ Melakukan moneyv untuk mengidentifikasi progres dan dampak